

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan. Oleh karena itu untuk meminimalisir risiko diperlukan kerjasama antar pegawai dan lembaga/instansi lain serta meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka kegiatan di Kecamatan Ngimbang juga harus dilakukan analisis manajemen risiko. Hal ini digunakan untuk dapat mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang memiliki risiko sehingga risiko tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan. Sehingga diharapkan kegiatan di Kecamatan Ngimbang dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

### **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
  4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
  5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

## II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

### A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Kecamatan Ngimbang telah Menyusun kegiatan - kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan III sebagaimana terlampir:

The screenshot shows a web-based application interface for 'SIMARIO - Kecamatan Ngimbang'. The URL in the address bar is [simario.lamongankab.go.id/user/infokom/23/dinas/346](http://simario.lamongankab.go.id/user/infokom/23/dinas/346). The page title is 'Infokom' under 'Kecamatan Ngimbang'. The main content area displays the 'Formulir Kartas Kerja' (Risk Management Plan) for the period 2025. The plan includes sections for 'Kegiatan Pengendalian yang Dielakukan', 'Risiko Strategis OPD Kecamatan Ngimbang', and 'Risiko Operasional OPD Kecamatan Ngimbang'. A large blue button at the bottom right says 'Simpan' (Save). The footer of the page includes the text 'Copyright © 2023'.

**Formulir Kartas Kerja**  
Periode pelaksanaan: Pengunjungan-Pengabdian yang dilakukan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dielakukan	Masa/Bentuk Sosara Pengendalian	Penyeksi Informasi	Penerima Informasi	Rencana Aktif/Pelaksanaan	Realisa Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Monitor pengujian logistik PTSP	Dengan melakukan survei melalui aplikasi VMS	Kel. Pemerintah	Desa/Dusun	Januari 2025	Januari 2025	Telah dilaksanakan
2	Monitor penerimaan Desa terhadap dana PNPD	Kepala Desa	Camat dan Para Camat	Rapat Desa/Pengajuan Desa BOS	Januari 2025	Januari 2025	Telah dilaksanakan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dielakukan	Masa/Bentuk Sosara Pengendalian	Penyeksi Informasi	Penerima Informasi	Rencana Aktif/Pelaksanaan	Realisa Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Monitor pengujian logistik PTSP	Dengan melakukan survei melalui aplikasi VMS	Kel. Pemerintah	Desa/Dusun	Januari 2025	Januari 2025	Telah dilaksanakan
2	Monitor penerimaan Desa terhadap dana PNPD	Kepala Desa	Camat dan Para Camat	Rapat Desa/Pengajuan Desa BOS	Januari 2025	Januari 2025	Telah dilaksanakan

## B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Kecamatan Ngimbang telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III, yang telah dilaksanakan adalah: Pengajuan logistic KTP, Memonitor perencanaan Desa harus selaras dengan RPJMD untuk sarana prasarana belum ada peningkatan dan peningkatan SDM sudah karena terdapat tambahan pegawai dari DPMPTSP.

The screenshot shows a web browser with five tabs open, all titled "Simario - Kecamatan Ngimbang". The active tab displays the "Monitor Risk Event & RTP" section of the platform. The URL in the address bar is [simario.lamongankab.go.id/user/moinitor-risk-event-rtp/23/dinas/346](http://simario.lamongankab.go.id/user/moinitor-risk-event-rtp/23/dinas/346).

The page header includes the "INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN" logo and a search bar. On the left, there is a sidebar with navigation links: Dashboard, RPMD, Renstra, Renja, Dinas Terkait, and Persperira. The main content area is titled "Infokom Pemerintah Kabupaten Lamongan" and shows the "Dinas Terkait" path: Dinas Terkait > Pemerintah Kabupaten Lamongan > Kecamatan Ngimbang > Monitor Risk Event & RTP.

The central part of the page is titled "Formulir Kertas Kerja Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP". It contains a table with the following data:

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko		Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangans	
			Tanggal Terjadi	Sebab						
1	Risiko Strategis OPD Kecamatan Ngimbang:	RSO.23.99.55.01	Pemerkir Januari – Maret 2025	Ketersediaan Logistic KTP belum terpenuhi	Bantuan terhadap pencatatan administrasi impornduklasi	Sudah dilaksanakan	Melakukan pengajuan logistic KTP	Maret 2025	Maret 2025	sudah terlaksana
2	Kurangnya pemahaman Kepala Desa dan Pemungku Kewajiban terhadap RPMD	RSO.23.99.55.02	Sudah Terwujud	Ego sektor Kepala Desa dalam menyusun perencanaan kurang diterangkan dengan RPMD	Hasil Program Pemerintahan kurang terhadap	Perlu dilakukan	Memonitor perencanaan Desa harus selaras dengan RPMD	Setiap Bulan	Setiap Rakor Kepala Desa, PPKD	sudah terlaksana
<b>Risiko Operasional OPD Kecamatan Ngimbang:</b>										
1	pelaksanaan MPP mini yang belum maximal	ROO.23.00.52.01	Sudah Terwujud	Belum wujudnya kurase dan prasentasi	Pelayanan masyarakat kurang maksimal	Dalam peringkatan	1. mengusulkan pada DPMPTSP (Dinas Perindustrian Model , Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Selama Bulan	Selama Bulan	sudah terlaksana

At the bottom of the form, there is a blue "Simpan" button.

### **III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Dalam melaksanakan kegiatan pengendalian risiko di Kecamatan Ngimbang, terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya hambatan antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko yaitu kurang dipahami Visi , misi yang tertuang dalam RPJMD kab. Lamongan dan Renstra Kecamatan ,yang mana Kecamatan tertuang dalam Misi 5 : “ Menghadirkan tata Kelola pemerintahan yang dinamis serta memberikan pelayanan publik yang berkwalitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi ” dengan dua Tujuan Meningkatnya pelayanan publik dan meningkatkan kemandirian desa sedangkan yang terjadi untuk mencapai tujuan tersebut Kepala Desa masih menggunakan ego sektoral dalam menyusun perencanaan yang kurang diselaraskan dengan RPJMD. Ketersediaan logistik administrasi dasar kependudukan seperti KTP dengan jarak Kecamatan Ngimbang dengan Kota Lamongan berjarak 1 jam, maka terjadinya kekosongan atau keterlambatan kesediaan logistik sehingga dapat memberikan citra buruk untuk instansi Kecamatan Sambeng selaku penyedia layanan kependudukan. Serta hambatan lain terkait dengan Pelayanan Publik masih terkendala sarana prasarana MPP mini yang belum memadai.

### **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa **diperlukan** pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III dapat simpulan bahwa diperlukan pemutakhiran risiko sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan monitoring secara berjenjang untuk memperkecil risiko.